

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya seluruh perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan laba dan mengembangkan usaha sebesar mungkin, oleh karena itu perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya perusahaannya untuk memperoleh laba. Menurut Hanafi dan Ismiyanti (2010) laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang merupakan hasil dari penjualan perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan biasanya memberikan kesempatan pada pihak eksternal (investor) untuk menanamkan modal ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang menjual sahamnya ke pihak investor, maka laba perusahaan tersebut selanjutnya akan disimpan sebagai laba ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham (*payout policy*).

Payout Policy atau kebijakan pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membagikan dalam bentuk dividen dan melakukan pembelian saham kembali (*treasury stock*). Menurut Fahmi (2012:83) dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan untuk investor atau pemegang saham. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang baik dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan cara mengelola

dividen. Untuk mengelola dividen dibutuhkan adanya kebijakan dividen yang merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan biaya cukup mahal karena perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk keperluan pembayaran dividen. Perusahaan dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah saja yang mampu membagikan dividen (Murhadi, 2008).

Pembelian saham kembali merupakan pembelian kembali sebagian saham yang beredar di pasar modal. Dibelinya saham kembali, maka jumlah saham yang beredar akan berkurang di pasar modal, sehingga diharapkan harga saham akan meningkat, dan perusahaan akan mendapatkan *capital gain* dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham ketika harga saham itu sudah meningkat. Pembelian kembali saham atau disebut sebagai *treasury stock* sering dilakukan oleh banyak sekali perusahaan di saat-saat tertentu. *Treasury stock* adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran dengan beberapa tujuan yaitu (Kieso, Weygyandt, dan Warfield, 2011:777):(1) Menaikan harga pasar saham, (2) Dijual kembali pada karyawan perusahaan, (3) Dibagikan sebagai dividen, dan (4) Menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Selain itu kondisi lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian saham kembali adalah karena nilai pasar saham berada di bawah nilai instrinsik (*undervalued*), dan perusahaan ingin membagikan kelebihan kas kepada para pemegang saham (*free cash flow*) (Dittmar, 2000).

Pembelian saham kembali sering dipandang sebagai isyarat positif bagi investor karena pada umumnya pembelian saham kembali dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham *undervalued* yang berarti bahwa saham perusahaan memiliki nilai intrinsik yang lebih besar daripada harga pasarnya. Pembelian saham kembali juga akan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar dan setelah perusahaan membeli kembali sahamnya, diharapkan ada kenaikan harga saham. Selain itu, keuntungan melakukan pembelian saham kembali adalah memperkecil jumlah pajak dan melakukan pembelian saham kembali para pemegang saham dapat memilih untuk menjual sahamnya atau tidak, dengan adanya pilihan seperti ini maka pemegang saham memiliki kebebasan dalam memilih keputusan. Selain itu pembelian saham kembali tidak hanya pada pilihan membagikan dana yang berlebih (*free cash flow*), tetapi juga kapan sebaiknya dana yang berlebih tersebut dikembalikan (Arianti, 2010). Untuk melakukan pembelian saham kembali, perusahaan harus memiliki dana yang lebih sehingga dapat melakukan pembelian saham kembali. Melakukan pembelian saham kembali menguntungkan di pihak perusahaan, karena perusahaan dapat melakukan pembelian saham kembali.

Setiap melakukan pembelian saham kembali perusahaan perlu mendapat kesepakatan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai kebijakan serta peraturan keuangan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembelian saham kembali perusahaan memiliki beberapa pertimbangan yang mempengaruhi

keputusan pembelian saham kembali yaitu stuktur kepemilikan perusahaan, selain itu perusahaan juga perlu mengetahui peraturan pembelian saham kembali tidak hanya memberikan sebuah keputusan. Adanya Peraturan mengenai pembelian saham kembali di Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan pembelian saham kembali dipagari secara ketat oleh ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lebih khusus adanya peraturan tata cara melakukan pembelian saham kembali yang dilakukan perseroan terbuka dan perseroan publik diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.XI.B.2 serta adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan No.09/POJK.04/2015 tentang pedoman transaksi pembelian saham kembali, selain itu adanya peraturan Bank Indonesia No. 15/12PBI/2013 mengatur tentang peyediaan modal minium Bank umum. Peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah bertujuan agar perusahaan yang melakukan pembelian saham kembali memiliki standar yang harus dipatuhi, dengan harapan perusahaan lebih tertib dalam pembelian saham kembali dengan aturan-aturan yang telah disusun oleh pemerintah.

Pada tahun 2012 bank dunia memproyeksikan Indonesia akan mengalami kemerosotan ekonomi pada tahun-tahun ke depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada di bawah 6 persen seperti yang dimuat di *website* Kompas (2 Mei 2014). Proyeksi tersebut terbukti

pada tahun 2015, nilai tukar dollar melonjak dari tahun 2013 sebesar Rp12.000 per USD hingga ke Rp14.000 per USD pada bulan Agustus 2015 serta dapat diprediksi akan menuju ke Rp15.000 pada akhir tahun 2015 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir 2015 tercatat 4.593,01 dengan kondisi bursa Asia melemah. Keadaan pasar modal yang menjadi fluktuatif sehingga para pemegang saham merasa terancam pada perekonomian Negara Indonesia, oleh karena itu dengan adanya fenomena ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan dengan demikian pembelian saham kembali merupakan sebuah kebijakan yang dapat diambil serta di sepakati dalam RUPS. Struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial dan institusional masing-masing mempunyai kepentingan yang berpengaruh pada keputusan pembelian saham kembali, baik secara internal maupun eksternal. Kepentingan untuk menentukan pembelian saham kembali pada saat kondisi nilai pasar ekonomi rendah (*undervalued*), hal ini diputuskan secara bersama-sama baik dari pihak institusional maupun manajerial melalui RUPS, namun di Indonesia kepemilikan manajerial masih sangat rendah dan kepemilikan institusional lebih tinggi dibandingkan kepemilikan manajerial (Larasati, 2011) dengan demikian penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pembelian kembali saham.

Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawasan karena ada kebijakan pembayaran, serta implikasinya, dengan

demikian struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh bagi kebijakan pembelian saham kembali dan bentuk struktur kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi setiap keputusan pembelian saham kembali yang disepakati dalam RUPS (Grinstein dan Michaely, 2005). Kepemilikan institusional berpengaruh dalam pembelian saham kembali karena pihak investor juga mempunyai hak atas pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan dan hak atas mendapatkan dividen sebagai hasil dari operasional perusahaan, (Perdana dan Harahap, 2014).

Objek penelitian adalah perusahaan perbankan periode 2011-2014, karena pada periode tersebut perusahaan perbankan memiliki frekuensi pembelian saham kembali lebih tinggi dari sektor lain (BEI, 2016). Seperti yang dimuat di surat kabar Kompas *online* (26 Agustus 2015) menurut ahli ekonomi Prasetyantono selaku komisaris independen bank Permata, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 kondisi ekonomi masih stabil namun muncul tanda-tanda IHSG menurun dan mempunyai dampak terhadap pasar saham Indonesia yang hampir sama seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi global pada 2008 yang terjadi karena investor asing melepas saham lalu menukar mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Dengan adanya fenomena tersebut maka pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2014 jumlah perusahaan yang melakukan pembelian saham kembali menjadi lebih tinggi yaitu sebanyak 55 perusahaan seluruh sektor (BEI, 2016). Periode penelitian pada tahun 2011-2014, karena pada periode tersebut perusahaan perbankan

memiliki frekuensi melakukan pembelian saham kembali yang lebih tinggi dengan presentase 26,30% untuk melakukan aksi pembelian saham kembali daripada perusahaan pada sektor lain dan keterbatasan data yang tersedia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pembelian saham kembali pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap pembelian saham kembali pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para investor sehingga lebih kritis untuk melakukan investasi dalam sebuah

perusahaan, meningkatkan keuntungan bagi investor, dan membuat rasio keuangan perusahaan terlihat lebih baik.

2. Manfaat Akademis

Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenisnya yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap pembelian saham kembali pada perusahaan perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, susunan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu; landasan teori; teori keagenan, asimetri informasi; hipotesis penelitian; dan model analisis

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; identifikasi variabel; definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti berikutnya.